

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten
Lampung Selatan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syari'ah**

Oleh :
NORMA SETIYANA
NPM : 1721020253
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.
Pembimbing II : Dani Amran Hakim, SH.,M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Akhir-akhir ini masyarakat dunia termasuk bangsa Indonesia diresahkan dengan virus yang sangat berbahaya yaitu *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dimana virus tersebut menyerang sistem pernafasan dan telah menewaskan ratusan bahkan ribuan jiwa manusia. Hal ini juga menyangkut kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi potensi penyebaran Covid-19. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* diharapkan bisa menekan penyebaran Covid-19. Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut tentunya melihat situasi dan kondisi suatu wilayah. Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan peraturan tersebut telah diimplemetasikan melalui Surat Edaran Bupati Lampung Selatan dengan Nomor: 442.2/0994/IV.02/2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Lampung Selatan. Dalam surat edaran tersebut berisi mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19. Langkah-langkah tersebut meliputi peliburan sekolah, pembentukan satgas Covid-19, penundaan kegiatan yang melibatkan orang banyak, menyediakan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer*, serta himbauan kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Surat edaran tersebut juga sebagai respon dari pemerintah daerah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PP 21/2020 PSBB.

Skripsi ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai sesuatu yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sudah terlaksana di Desa Jatibaru melalui Surat Edaran Bupati Lampung Selatan, hanya saja belum terimplementasi secara maksimal sebagaimana faktor yang menghambat terimplementasinya peraturan tersebut. Dalam pandangan hukum Islam peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jatibaru sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena telah berusaha untuk mengimplementasikan PP 21/2020 PSBB. Peran-peran tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norma Setiyana

NPM : 1721020253

Prodi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab penuh pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Juni 2021




Norma Setiyana
NPM: 1721020253



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatibaru Kecamatan
Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).

Nama : Norma Setiyana

Npm : 1721020253

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Dani Amran Hakim, SH., M.H

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh, Norma Setiyana NPM. 1721020253, program studi Siyasaah Syar’iyyah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari Rabu, 07 Juli 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

Sekretaris : Rudi Santoso, MHI, MH

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Penguji II : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Penguji III : Dani Amran Hakim, SH., M.H


.....

.....

.....

.....

.....



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

❖ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

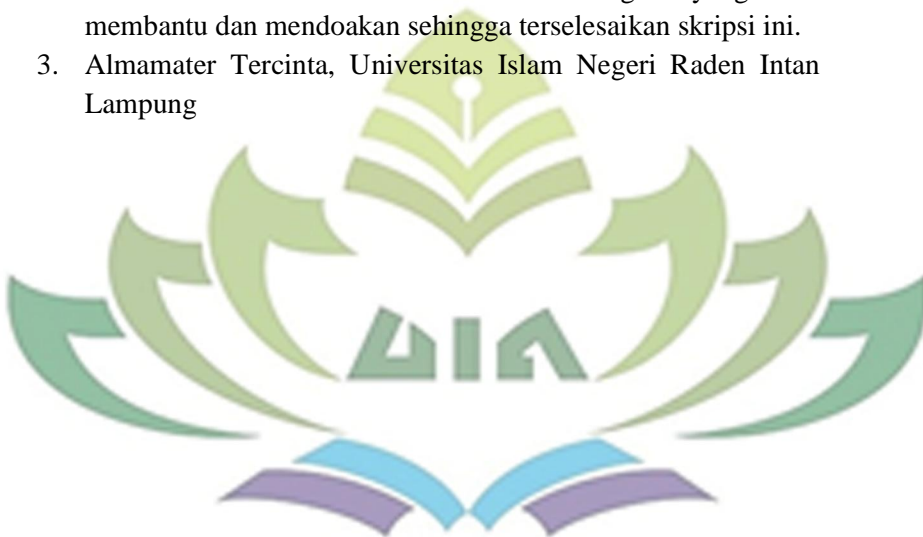
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”(QS. An Nisa: 58).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil a'lam, dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sutrisno dan Ibu Waljiyem yang telah setulus hati dan tidak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, bimbingan, arahan, motivasi, dan doa yang selalu di panjatkan di setiap sholatnya.
2. Adikku Bima Rifwanto dan seluruh keluargaku yang turut membantu dan mendoakan sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



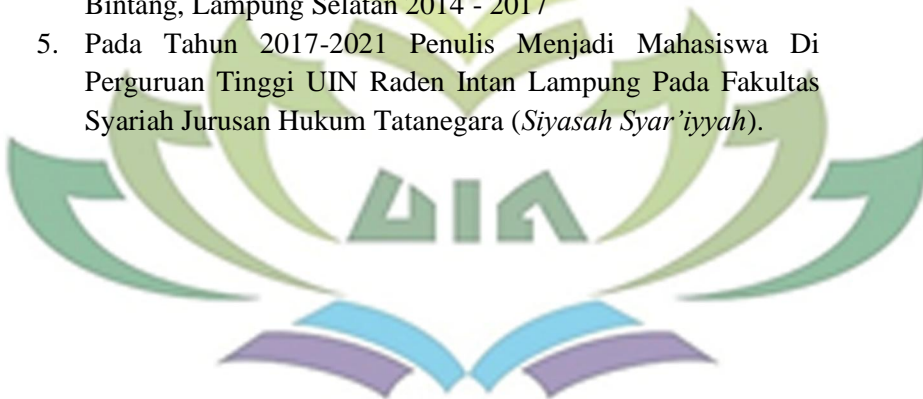
RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Norma Setiyana, lahir di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 22 Juli 1998.

Penulis merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Waljiyem.

Jenjang pendidikan yang telah di tempuh adalah :

1. TK Al-Azhar 10 Jatibaru Tanjung Bintang, Lampung Selatan 2004 - 2005
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Jatibaru Tanjung Bintang, Lampung Selatan 2005 - 2011
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Tanjung Bintang, Lampung Selatan 2011 - 2014
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Diponegoro Tanjung Bintang, Lampung Selatan 2014 - 2017
5. Pada Tahun 2017-2021 Penulis Menjadi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kenikmatan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”** dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat, thabiin, serta para umatnya.

Penullisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah (Hukum Tatanegara) dan bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku sekretaris jurusan Siyasah (Hukum Tatanegara) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Susiadi AS.,M.Sos.I. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dani Amran Hakim, SH.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di perkuliahan ini sampai sampai terselesainya penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu memberikan literatur dan referensi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pemerintah Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang yang telah memberikan izin menjadi tempat penelitian hingga terselesainya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaikku Aziz Wahab, Imroatul Mufidah, Desy Shelawati, Alma Depa Yanti, Gadis Enjelita, Aulia Latif, Rendi Yana Aldo P, Hefrian Fareza, Hidayatullah, Septian Hendra W dan Ciput, yang selalu menemani dari awal perjuangan sampai akhir perjuangan baik suka maupun duka dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2017 Prodi Siyasa (Hukum Tatanegara) dan kawan-kawan KKN-DR dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak semangat dan dukungannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan, itu semua karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya dengan ucapan terimakasih, penulis memanjatkan doa semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi ladang amal dan di terima oleh Allah SWT, dan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi semua pihak dalam upaya perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 15
Juni 2021

Norma Setiyana
NPM: 1721020253

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus penelitian dan sub-fokus penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metodologi Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Fiqh Siyasah	
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	15
2. Sumber Kajian Fiqh Siyasah	15
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	17
4. Fiqh Siyasah Tandfiziyah.....	19
B. Pemerintah Desa	
1. Pengertian Pemerintah Desa.....	20
2. Unsur Pemerintah Desa	22
3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa	24

C. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar	
1. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar	31
2. Tujuan Diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar.....	32
3. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020.....	34
4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat Desa Jatibaru	41
2. Letak Geografis Desa Jatibaru	45
3. Keadaan Demografis Desa Jatibaru	47
B. Peran Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020.....	50
C. Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020.....	55
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.....	61
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.....	64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Nama-Nama Kepala Desa Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa.....	43
2. Daftar Nama Kepala Dusun Desa Jatibaru Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Periode 2020-2025	45
3. Jumlah penduduk keseluruhan Desa Jatibaru.....	47
4. Agama Yang Ada Di Desa Jatibaru	47
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	48
7. Sarana Dan Prasarana Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang	49



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.....24
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun31
3. Struktur Pemerintahan Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019 – 2025...44
4. Peta Desa Jatibaru46



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah **“Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”** Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut :

1. Peran adalah: aspek dinamis dari kedudukan atau status.¹ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya atau sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat, dia menjalankan suatu peranan.
2. Pemerintah Desa adalah: Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.² Penyelenggaraan tersebut baik dalam urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.³
4. Hukum Islam adalah: hukum atau ketentuan perintah yang bersumber dari Allah SWT., baik yang wajib, haram, maupun mubah. Atau seperangkat kaidah yang mengatur tingkah laku

¹ Dwi, “Pengertian Peran Secara Umum,” June 2016, <https://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html?m=1>. diunduh tanggal 14 September 2020.

² “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (3)”.

³ “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 1.”.

manusia yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Islam.⁴ Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Akal Pikiran (*Ra'yu atau Ijtihad*).⁵

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang penulis maksud dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) adalah suatu penelitian untuk mengungkap dan mengkaji bagaimana peran Pemerintah Desa Jatibaru dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam menanggulangi COVID-19 menurut Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Saat ini masyarakat dunia termasuk bangsa Indonesia diresahkan dengan adanya virus yang sangat berbahaya yaitu Virus Covid-19. Virus tersebut telah menewaskan ratusan bahkan ribuan jiwa manusia, dimana virus tersebut menyerang sistem pernafasan. Wabah Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan China telah menjadi pandemi yang menyebar di berbagai Negara.

Peningkatan kasus Covid-19 ini tergolong sangat cepat dan signifikan, sehingga memerlukan respons internasional yang terkoordinasi dan upaya antisipasi dari seluruh Negara. Hal ini menyangkut kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi potensi penyebaran Covid-19. Kesiapsiagaan yang dilakukan berprinsip pada penanggulangan wabah, yaitu pada fase pencegahan, deteksi, dan respons. Hal tersebut diperlukan kerja sama lintas sektor, baik dengan Kementerian atau Lembaga terkait maupun Pemerintah Daerah bahkan Pemerintah Desa, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pembentukan Satgas Covid-19 untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

⁴ Albani Nasution and Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). h. 4.

⁵ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, I (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014). h. 69.

Dalam rangka pembentukan Satgas Covid-19 atau relawan Covid-19 Desa Jatibaru melakukan musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Babinkamtibmas, Babinsa dan unsur lainnya. Dengan meningkatnya penyebaran virus corona yang signifikan, pemerintah telah membuat kebijakan atau peraturan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut meliputi pola hidup bersih dan *sosial distancing*.

Salah satu Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* selanjutnya disingkat menjadi PP No 21/2020 PSBB. Dalam peraturan tersebut menjelaskan beberapa tentang pembatasan kegiatan untuk mencegah percepatan penyebaran Covid-19 salah satunya adalah pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Dengan dikeluarkannya PP No 21/2020 PSBB tersebut diharapkan agar bisa menekan peningkatan Covid-19.

Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang, meskipun diawal pandemi Desa Jatibaru termasuk dalam kategori zona hijau, pemerintah Desa Jatibaru tetap melakukan kegiatan pengawasan dan memberikan sosialisasi dalam kegiatan bagaimana cara penanggulangan Covid-19 dan menerapkan pola hidup sehat. Secara tidak langsung Desa Jatibaru juga mengimplementasikan atau menerapkan PP No 21/2020 PSBB seperti selalu memberikan himbauan kepada masyarakat apabila akan melaksanakan hajatan untuk tidak membuat pesta yang besar, tidak membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan, begitupun pengajian.

Namun demikian, ditengah pandemi yang sedang terjadi masih ada saja masyarakat yang enggan berdiam diri di rumah atau melakukan pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan Covid-19 sebagaimana diminta oleh pemerintah. Dalam peraturan pemerintah tersebut mungkin tidak jauh berbeda dengan ajaran dalam islam.

Berdasarkan Hadits Bukhari – Muslim nomor 1434 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari

Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab radliallahu 'anhu berangkat ke Syam. Ketika dia sampai di suatu kota yang bernama Saragh, dia mendengar berita bahwa wabah sedang menimpa Syam. Maka Abdurrahman bin Auf mengabarinya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian mendengar wabah berada di suatu kawasan, janganlah kalian datang kesana, dan jika terjadi di suatu kawasan yang kalian diami, jangan kalian meninggalkannya." Spontan Umar meninggalkan kota Saragh. Dan dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Umar pulang karena hadits Abdurrahman ini.

Hadits tersebut berbunyi :

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ

"Maka Abdurrahman bin Auf mengabarinya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian mendengar wabah berada di suatu kawasan, janganlah kalian datang kesana, dan jika terjadi di suatu kawasan yang kalian diami, jangan kalian meninggalkannya."⁶

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwasannya disaat suatu wilayah atau tempat yang kita tinggali sedang terjadi sebuah pandemic atau sedang terlanda suatu wabah hendaklah kita agar tetap mendiami wilayah tersebut. Di tengah pandemi saat ini, hal tersebut seringkali di acuhkan oleh masyarakat atau kurang disiplinnya masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi PP NO 21/2020 PSBB Perspektif Hukum Islam guna

⁶ Shahih Bukhari-Muslim, *Al-Lu' Lu' Wal Marjan* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017). h. 835.

mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang.

C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk meneliti bagaimana peran pemerintah desa dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dibatasi pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah Bupati Lampung Selatan mengenai pelaksanaan pencegahan maupun penanggulangan Covid-19 berdasarkan pada peraturan-peraturan yang merujuk pada pencegahan maupun penanggulangan Covid-19, salah satunya PP NO 21 /2020 PSBB.

Sedangkan yang menjadi sub-fokus pada penelitian ini adalah pemerintah Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan mengenai penanggulangan Covid-19.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Jatibaru dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Menanggulangi Covid-19 ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Pemerintah Desa dalam mengimplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Menanggulangi Covid-19 ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang :

- a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Jatibaru dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Menanggulangi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Menanggulangi Covid-19.

F. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangsih pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait permasalahan dalam hal ini serta sebagai referensi atau bahan pustaka untuk penelitian dimasa yang akan datang.
- b. Manfaat praktisi dalam penelitian ini yaitu diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, peneliti dan instansi pemerintah terkait dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan agar penulis mengetahui hal-hal apa saja yang diteliti dan apa yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian yang sudah ada pada sebelumnya. Terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki tema serupa dengan penelitian penulis, terkait pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”, yaitu:

1. Karya Dian Herdiana, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi, dengan karya ilmiah yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pada penelitian tersebut secara teori terdapat beberapa kesamaan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu implementasi PSBB. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan PSBB secara empiris kurang berjalan optimal. Berdasarkan pada tiga indikator yang diteliti yaitu subtransi kebijakan, para pelaksana dan kelompok sasaran menunjukkan bahwa kebijakan yang jelas serta telah

diimplementasikan dengan baik, akan tetapi yang menjadi kendala yaitu bahwa masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak sepenuhnya menaati kebijakan PSBB yang disebabkan oleh tiga hal yaitu ketidakpahaman masyarakat terhadap kebijakan PSBB, ketidakmauan dan ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan kebijakan PSBB. Yang menjadi perbedaan mengerucut dalam skripsi ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan PSBB di desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Karya Ahmad Fauzi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, dengan karya ilmiah yang berjudul Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Pada karya ilmiah tersebut, secara kajian teori terdapat beberapa kesamaan dengan skripsi ini. Persamaannya terdapat pada pembahasan implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karya tersebut dibuat untuk mendeskripsikan secara umum terkait implementasi PSBB sebagai kebijakan pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam karya tersebut penulis tersebut membatasi kajian-kajian terkait hasil kebijakan. Terdapat tiga dasar hukum pelaksanaan kebijakan PSBB yaitu, Pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1884 Tentang Wabah Penyakit Menular. Dari ketiga undang-undang tersebut terdapat pemahaman terkait dasar hukum dan implementasi kebijakan dalam kesatuan persepsi, pandangan, sehingga masih terdapat bias dalam tahap implementasi. Perbedaan dengan skripsi ini adalah bagaimana peran pemerintah desa Jatibaru dalam mengimplementasikan PSBB dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam mengimplementasikan PSBB.
3. Karya Aprista Ristyawati, mahasiswa Universitas Diponegoro, dengan karya ilmiah yang berjudul Efektifitas

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Pada penelitian tersebut secara kajian teori terdapat beberapa kesamaan dalam skripsi ini. persamaan tersebut terdapat pada kesamaan pembahasan mengenai implementasi PSBB. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa apabila dilihat dari tinjauan kebijakan PSBB yang dipilih oleh pemerintah dalam menyikapi kasus Covid-19 yang sedang terjadi, memang masih dalam proses pelaksanaan, namun di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang mengalami perkembangan dengan kebijakan yang ada. Tetapi jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam ini yaitu kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Terutama berkaitan dengan tanggungjawab negara terhadap kesehatan masyarakat dengan tenaga medis yang ada khususnya. Perbedaan dengan skripsi ini adalah terletak pada rumusan masalah, pada skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana Peran Pemerintah Desa Jatibaru dalam mengimplementasikan peraturan PSBB dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi PSBB.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni “suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau objek tertentu yang menjadi objek dalam penelitian.”⁷ Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan dan menguraikan mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data, baik manusia maupun bukan manusia. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa dan seluruh staf Pemerintah Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 7 orang dan relawan Covid-19 yang berjumlah 39 orang, serta 5 warga Jatibaru.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah atau yang mewakili dari populasi yang diteliti.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menetapkan sampel berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu yang diketahui sebelumnya.⁹ Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari kepala desa, staf pemerintah desa, gugus

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, VII (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007).

⁸ Etta Mamang Sangadi, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010).h. 186.

⁹ Ibid. h.188.

tugas atau relawan Covid-19, dan masyarakat desa Jatibaru. Sembilan sampel tersebut dipilih karena dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, dan dianggap memiliki pengaruh penting dalam penerapan peraturan pemerintah dalam pembatasan sosial berskala besar terkait penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama atau diperoleh secara langsung dari sumber asli.¹⁰ Hasil tersebut biasanya melalui wawancara, observasi dan pendapat dari narasumber. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari kepala desa, staf Pemerintah Desa Jatibaru, gugus tugas atau relawan Covid-19, dan masyarakat desa Jatibaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang menjadi pendukung dari masalah dalam penelitian ini yaitu berupa :

1. Data primer terdiri dari Al-Quran, Sunnah, buku-buku, teori fiqh siyasah, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dan jurnal hasil penelitian.
2. Data sekunder terdiri dari ensiklopedia, kamus, majalah, koran, dan situs website online.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.¹¹ Penelitian ini menggunakan wawancara secara langsung dan

¹⁰ Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (BANDUNG: MANDAR MAJU, 2002).h. 73.

¹¹ Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*.h. 171.

mengajukan pertanyaan yang telah ditentukan yang berkaitan dengan permasalahan.

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau keterangan dari pemerintah desa Jatibaru. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas (tidak berstruktur), sehingga responden secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

b. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang teliti.¹²

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹³ Dokumentasi ini dilakukan di Desa Jatibaru.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu dilakukan untuk mengoreksi atau memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah cukup baik, dan sudah relevan dari data yang diperoleh dari penelitian di lapangan maupun dari studi literature yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah disesuaikan dengan kajian penelitian. Yaitu Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi PP No. 21/2020 Tentang PSBB Perspektif

¹² Ibid. 171

¹³ Purnomo Setiady Akbar and Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (JAKARTA: BumiAksara, 2008).h. 69.

Hukum Islam mengenai penanggulangan Covid-19, yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif. Maksudnya adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau memberikan gambaran bagaimana peran pemerintah Desa Jatibaru dalam Implementasi PP No 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam Mengenai Penanggulangan Covid-19. Tujuannya dapat dilihat dari perspektif hukum Islam.

Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara berfikir yang terangkat dari pengetahuan yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek sesuatu yang khusus, atau pengertian secara umum adalah penarikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh yang khusus dari hal yang umum.

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang bahasan mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca lebih mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab, yaitu meliputi :

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab Kedua, Landasan Teori yang meliputi: Pengertian Pemerintah Desa, Unsur Pemerintah Desa, Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa, Kajian Teori Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Pengetian

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Tujuan Diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

3. Bab Ketiga, Deskripsi Objek Penelitian, yang meliputi: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Letak Geografis Desa Jatibaru, Sejarah Singkat Desa Jatibaru, Peran Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Upaya Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Serta Faktor Pendorong Dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
4. Bab Keempat, Analisis Penelitian, yang meliputi: Peran Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Desa Jatibaru Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
5. Bab Kelima, Penutup, dalam bab ini penulis akan menguraikan kedalam dua sub yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam.”¹⁴ Fiqih adalah hasil pemahaman para ulama (ulama) terhadap satu ayat sekaligus dan satu per satu hadis.¹⁵ Fiqh secara etimologi adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁶ Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”¹⁷

Berdasarkan penjelasan mengenai *fiqh* dan *siyasah* maka dapat disimpulkan yakni, *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang tata cara bermasyarakat dan bernegara demi mencapai kemaslahatan bersama.

2. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber inilah disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan ketentuan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *fiqh siyasah*. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan

¹⁴ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 2.

¹⁵ Firdaus Firdaus and Zainal Azwar, Terjemah “The Role of Substantive Understanding Approaches in The Changes of Fiqh,” *AL-ADALAH* 17, no. 1 (2020): 71–96, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6031>.

¹⁶ Ahmad Sukardja, Mujar Ibnu Syarif, *TIGA KATEGORI HUKUM Syariat, Fikih, Dan Kanun* (jakarta: sinar grafika, 2012). h. 70.

¹⁷ Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. h. 3-4.

dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Dalam buku Muhammad Iqbal yang berjudul *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Fathiyah al-Nabrawi dan Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber-sumber fiqh siyasah.¹⁸

Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Al-Qur'an.
2. Al-Sunnah.
3. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu atau pendapat para ulama.

Sedangkan Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya., seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan.

Beberapa dasar hukum yang dianggap berkaitan dengan fiqh siyasah syar'iyah, baik langsung ataupun tidak langsung. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (المؤمنون : ٥٢)

“Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku” (QS. Al-Mu'minun: 52).

¹⁸ Ibid. h.16.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(سورة النساء : ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”(An Nisa: 58).

Ayat ini berisi perintah Allah SWT agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya, kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat serta di janjikan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau kelas tertentu.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi menjadi delapan bidang pembahasan. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Ilmu *Fiqh Siyasah* sering disamakan dengan ilmu *Siyasah Syar’iyyah* yang memiliki pengertian ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam seperti (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah mencakup lima bahasan yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
2. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter atau siyasah keuangan)
3. *Siyasah Qadha'iyyah* (peradilan)
4. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
5. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara)

Adapun imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian dalam ruang lingkup fiqh siyasah, yaitu :

1. *Siyasah Qadha'iyyah* (peradilan)
2. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara)
3. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter atau siyasah keuangan)
4. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (hubungan internasional)

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah* lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
2. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (politik hukum)
3. *Siyasah Qhadha'iyyah Syar'iyyah* (politik peradilan)
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (politik ekonomi dan moneter)
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (politik administrasi negara)
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah syar'iyyah* (politik hubungan internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan)

Dalam perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjannjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain.

Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

4. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah adalah Siyasah yang berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang-undangan. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau khalifah. Istilah *ul al-amir* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi. Namun di karenakan praktek pemerintahan Islam yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas melaksanakan undangan seperti *Diwan al-Kharuj* (dewan pajak), *diwan al-Ah Das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-Bait al-Mal* (pejabat keuangan) dan sebagainya yang telah ada

sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab.¹⁹ Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, umat Islam di perintahkan untuk menaatinya dengan syarat lembaga eksekutif ini tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya.

Badan Eksekutif sendiri memiliki pengertian sebagai pelaksana undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif bersama pemerintah.²⁰ Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala Negara dan kepala pemerintahan serta kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Tugas dari *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar Negara.

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

a. Desa

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “*swadesi*” bahasa sansekerta yang memiliki arti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.²¹ Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Desa atau nama lain di Indonesia merupakan salah satu model atau tingkat pemerintahan yang memiliki kekhasan. Kekhasan desa atau dengan nama lain itu terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa pakaian, budaya dan sebagainya.²²

¹⁹ Abu a’la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993). Cet II.247.

²⁰ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).h. 189.

²¹ Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa* (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Aura Publishing, 2017). h. 1.

²² Zuhraini, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014). h. 69.

Menurut KBBI Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Keberadaan desa sudah dikenal lama dalam susunan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai objek administrative, tetapi sebagai objek hukum yang berarti harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan.

b. Pemerintah

Istilah Pemerintah dalam buku karangan Muhadam Labolo yang berjudul *Memahami Ilmu Pemerintahan Satu Kajian, Teori, Konsep, dan Perkembangannya* setidaknya menunjukkan pada empat pengertian pokok, yaitu salah satunya adalah pemerintah menunjukkan secara langsung pada orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.²⁵ Pemerintah juga memiliki arti sebagai lembaga atau alat negara yang menjalankan

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). h. 318.

²⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

²⁵ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Satu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).h. 15

tugas dan peran pemerintahan atau bisa juga disebut sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk menjalankan kekuasaan yang dalam arti ini menjalankan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.²⁶

c. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan pengertian tersebut, jelas Kepala Desa memiliki kedudukan yang penting sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.²⁷

Sebagai organisasi kekuasaan dan organisasi pemerintahan, desa memiliki sejumlah kewenangan, salah satunya adalah penetapan organisasi pemerintah desa dan perangkatnya. Penyusunan dan penetapan struktur organisasi ini didasarkan pada kebutuhan desa itu sendiri. Sehingga, susunan atau tatanan organisasi pemerintahan di tiap desa tidak sama satu sama lain. Idealnya penyusunan organisasi di tingkat desa didasarkan pada kebutuhan pemerintah desa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik baik dalam hal pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan maupun penganggaran dana desa.

2. Unsur Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari

²⁶ Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.h.83.
<https://www.neliti.com/id/publications/275406/pemerintahan-desa>

²⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (3).

sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.²⁸ Sekretaris desa yang kemudian disebut sekdes dan perangkat desa lainnya merupakan aparatur pemerintah desa di bawah naungan kepala desa. Adapun yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya biasanya sebutan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR)/Kepala Seksi (KASI) dan unsur Kewilayahan/Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap pemerintahan desa.

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.²⁹ Secara yuridis formal, kedudukan perangkat desa tercantum di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni pada Pasal 48 yang menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari :

- a. Sekretaris desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

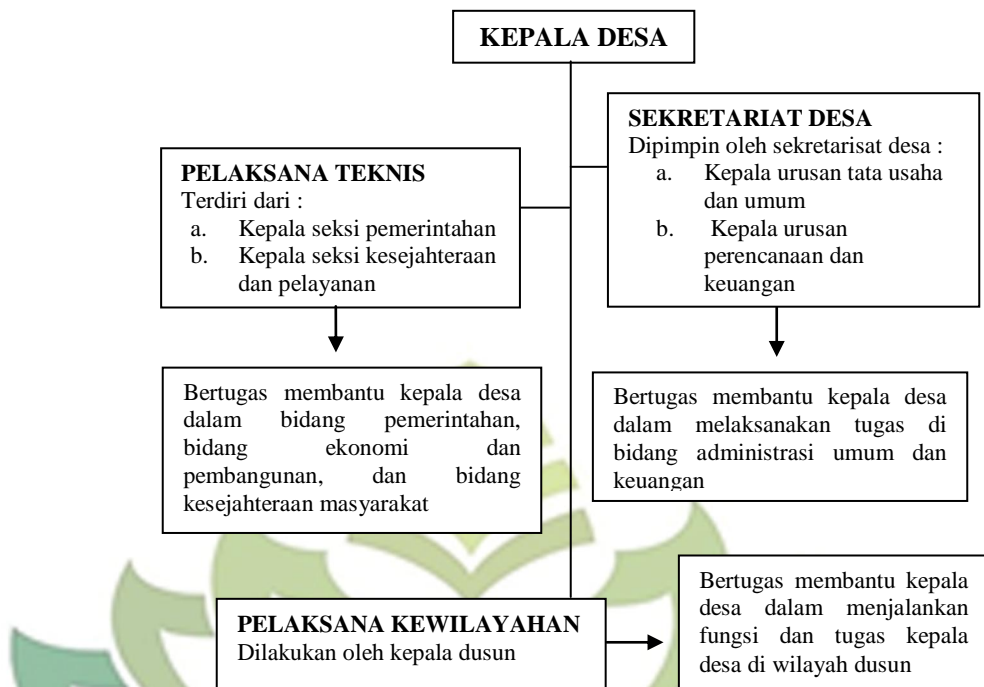
Jumlah dan jabatan perangkat desa disesuaikan dengan tradisi dan perkembangan setempat yang diatur melalui perda dan perdes. Unsur-unsur perangkat desa yaitu :

1. Unsur staf, yaitu petugas pelayanan kegiatan administrasi pemerintahan desa, seperti sekretaris desa dan/ atau tata usaha desa.
2. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan, seperti urusan pamong tani desa, dan urusan keamanan.
3. Urusan wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa, seperti kepala dusun.

²⁸ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). h. 157.

²⁹ Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011). h. 297.

Gambar 1. Struktur Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa



(Sumber : Adira Fairus, Mengenal Desa Dan Pemerintahan Desa, 2020.)

3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam buku karangan Hanif Nurcholis yang berjudul *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, kepala desa mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan tugasnya yaitu:³⁰

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Mengangkat dan meberhentikan perangkat desa;

³⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011). h. 74.

- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- 5) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- 6) Membina kehidupan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 7) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 8) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 9) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara parsitipatif;
- 10) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 26 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yakni kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokratis;
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- 10) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- 11) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.³¹

Kepala Desa sebagai salah satu pemegang kekuasaan di desa tidak hanya selalu tampil dominan dalam urusan publik dan politik tapi juga berkewajiban untuk mengembangkan tata pemerintahan desa yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, berdaya tanggap, kepercayaan, dan kebersamaan.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai pimpinan dalam unsur staf atau pelayanan dalam sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa paling banyak terdiri dari tiga bidang urusan sesuai kebutuhan pemerintahan desa setempat. Beberapa urusan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, keuangan, dan umum. Sekretaris juga bertanggungjawab atas pengelolaan buku administrasi desa. Sekretaris desa juga bertugas mengelola Buku Data Peraturan Desa, Buku Data Peraturan Kepala Desa, Buku Data Keputusan Kepala Desa, Buku Monografi Desa, dan Buku Profil Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 yang selanjutnya disebut PERMENDAGRI No 84/2015 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Desa yakni pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris yaitu :

³¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (3).

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Dalam hal ini sekdes dibantu oleh kepala urusan yang selanjutnya disebut kaur
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melakukan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepada desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.³²

c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Kepala Urusan yang selanjutnya disebut KAUR berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kaur bertugas membantu sekdes dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Berdasarkan PERMENDAGRI No 84/2015 Pasal 8 ayat (3) untuk melaksanakan tugas KAUR memiliki fungsi :

1. Kaur Perencanaan dan Umum adalah unsur pembantu sekretaris desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan buku data inventaris desa, buku data tanah milik desa, buku aparat pemerintahan desa, buku agenda surat masuk dan keluar, buku ekspedisi, serta buku tamu.

Adapun fungsi dari sekretaris desa adalah mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

³² “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 7 Ayat (1-3)”.

2. Kaur Tata Usaha dan Umum adalah unsur pembantu sekretaris desa yang bertanggungjawab kepada kepala desa dan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umu.
3. Kaur Keuangan adalah unsur pembantu sekretaris desa untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan yang berkaitan dengan keuangan desa/ arus kas desa. Kaur keuangan bertanggungjawaban atas pengelolaan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran, buku kas harian pembantu, buku catatan pajak (PPN dan PPH). Adapun fungsi dari kepala urusan keuangan adalah melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran keuangan, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.

Sedangkan pelaksana teknis adalah unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis pelaksanaan tugas operasional di lapangan, seperti pamong tani desa, urusan keamanan, urusan keagamaan, kebersihan, urusan pengembangan ekonomi desa, dan kesejahteraan sosial. Unsur pelaksana memiliki tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan lapangan dalam bidang tugasnya. Pelaksana teknis sebanyak-banyaknya terdiri atas tiga seksi, misalnya :

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi atau biasa disebut kasi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pada Pasal 9 ayat (3) PERMENDAGRI No 84/2015 untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi :

1. Kepala Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan

- ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
2. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi seperti Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 3. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, Melestarikan nilai sosial budaya masyarakat, Membina keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d. Pelaksana Kewilayahan

Kepala kewilayahan/kepala dusun atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayah bagian desa.³³ Kepala dusun merupakan orang yang dipilih langsung oleh kepala desa dan/atau dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT).

Tugas kepala dusun antara lain :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
3. Melakukan peningkatan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
4. Membantu kepala desa dalam rangka pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

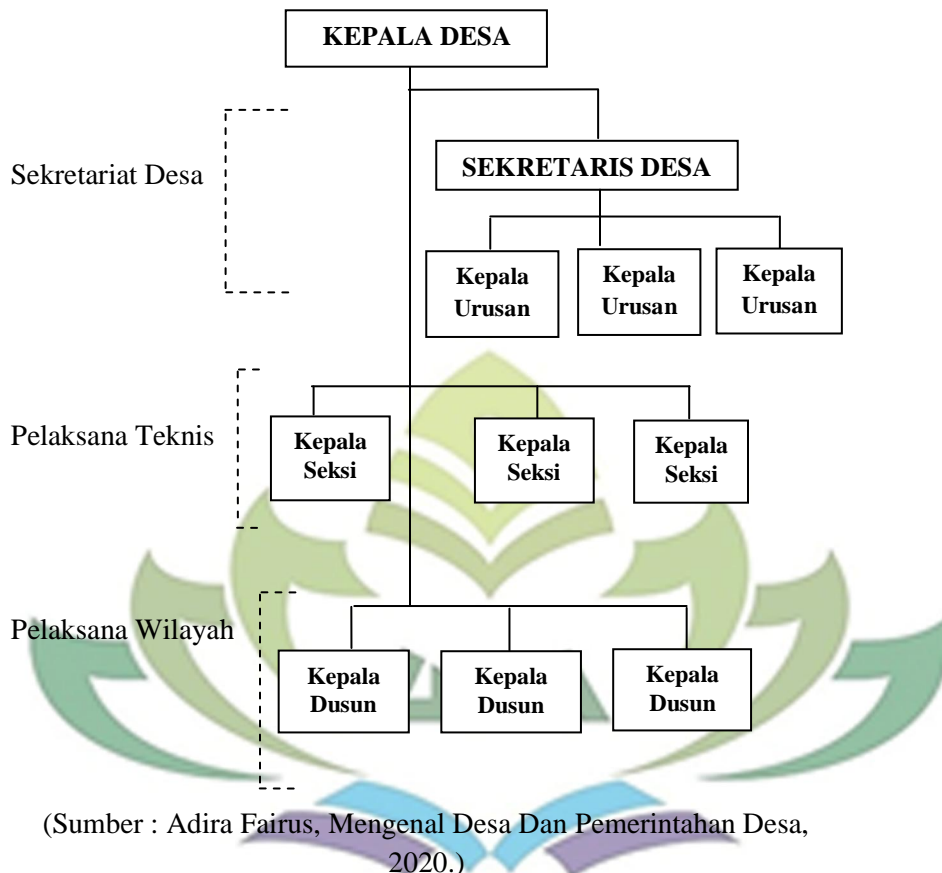
Fungsi kepala dusun antara lain :

³³ Adira Fairus, *Mengenal Desa Dan Pemerintah Desa* (Yogyakarta: Pixelindo, 2020). h. 103.

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014



C. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

1. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut PP NO 21/2020 PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah

yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.³⁴ Terbitnya PP NO 21/2020 PSBB adalah Sebagai turunan dari Undang-Undang Kekarantinaan kesehatan serta melihat kondisi yang terjadi akibat mewabahnya Covid-19.

Terbitnya peraturan pemerintah tersebut juga dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 hingga lintas negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Covid-19* dalam bentuk tindakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka menekan penyebaran *Covid-19* agar tidak semakin meluas.³⁵ Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19* termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Berdasarkan Pasal 4 PP NO 21/2020 pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

2. Tujuan Diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Ditahun 2020 perkembangan permulaan Covid-19 cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan

³⁴ “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 1.”

³⁵ Muh Hasrul, “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).,” *Jurnal Legislatif* 3 (2020): 385–98.h. 387.

perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, diantaranya adalah pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya untuk meningkatkan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya berawal dari upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh.³⁶

Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disebut PSBB tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana yang dimaksud adalah upaya untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan beberapa faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.³⁷ Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa yang ditandai penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Inti dari peraturan PSBB sebenarnya tidak jauh berbeda dengan himbauan Pembatasan Sosial (*sosial distancing*) yang sudah

³⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”.

³⁷ Lutfi Fahrul Rizal, “PERSPEKTIF SIYÂSAH SYAR’IYYAH TENTANG DARURAT NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 41–64, h.50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404>.

pemerintah terapkan sebelumnya. PSBB tidak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat. Pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB. Dengan diberlakukannya PSBB masyarakat juga turut berkontribusi dan menaati peraturan pemerintah agar penyebaran Covid-19 bisa berhenti. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari PSBB tersebut adalah sebagai cara untuk menekan bahkan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Tentu saja hal ini juga harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan selalu mematuhi protokol kesehatan ketika berada diluar rumah.

3. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020

Kebijakan PSBB diatur secara nasional melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Peraturan tersebut secara operasional dijelaskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Kedua aturan tersebut secara tegas menetapkan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan guna mencegah penyebaran Covid-19 secara meluas.

Pengertian yang dijadikan dasar pemahaman yang mana PSBB dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)”.³⁸ Berdasarkan pemahaman tersebut maka PSBB merupakan kebijakan

³⁸ “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pasal 1 Ayat (1).

dengan konsep sosial distancing yang mana hanya membatasi kegiatan yang dilakukan di suatu wilayah, bukan menghentikan semua aktivitas yang berada di suatu wilayah tertentu sebagaimana konsep lockdown.

Kewenangan penetapan PSBB merupakan hak dari menteri kesehatan yang mana Gubernur atau Walikota/Bupati dapat mengajukan permohonan PSBB kepada menteri kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, selain itu dijelaskan dalam Pasal 6 bahwa ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dapat mengajukan permohonan PSBB di suatu wilayah tertentu.³⁹ Untuk menjalankan suatu kebijakan dibutuhkan para pelaksana yang merupakan penggerak dari sebuah kebijakan tersebut. Dikaitkan dengan konteks implementasi kebijakan PSBB maka para pelaksana dibagi kedalam dua tingkatan, yaitu para pelaksana yang berada dalam tingkat pemerintahan pusat dan para pelaksana yang berada dalam tingkat pemerintahan daerah, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Para pelaksana di kedua tingkat pemerintahan ini memiliki tugas masing-masing yang mana di tingkat pemerintah pusat memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan PSBB yang cangkupannya seluruh wilayah yang ada di Indonesia, sedangkan para pelaksana di tingkat daerah memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan PSBB di tiap daerahnya masing-masing, meskipun demikian pelaksanaan kebijakan PSBB merujuk pada aturan yang sama yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat.

Untuk dapat ditetapkan PSBB di suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria seperti jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum kepala desa untuk melakukan perannya terkait pencegahan penyebaran Covid-19 seperti melakukan peliburan kegiatan belajar mengajar, menunda semua kegiatan yang melibatkan orang banyak, mensosialisasikan tentang

³⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5.

Covid-19, himbauan kepada warganya agar selalu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta membentuk Satgas Covid-19, yakni berdasarkan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor : 442.2/0994/IV.02/2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Lampung Selatan. Surat edaran tersebut dikeluarkan yakni sebagai respon pemerintah daerah terhadap PP 21/2020 PSBB.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong perangkat desa mengambil peran khusus dalam penanggulangan Covid-19. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Informasi (BALILATFO) Kemendes PDTT, Eko Sri Haryanto mengatakan pada konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur pada 5 April 2020, perangkat desa harus tunduk terhadap apa yang telah diamanatkan oleh pemerintah. Beliau menjabarkan beberapa peran khusus perangkat desa dalam mempercepat penanggulangan Covid-19 di tingkat desa.⁴⁰

1. Perangkat Desa harus mengelolah data arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama pandemi.
2. Perangkat Desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi.
3. Perangkat Desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Misalnya, himbauan untuk sementara waktu menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.
4. Perangkat Desa harus membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi. Contohnya aturan

⁴⁰ Fitria Chusna Farisa, "5 Tugas Khusus Perangkat Desa Untuk Tanggulangi Covid-19," *Kompas.Com*, April 5, 2020, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/05/12343071/5-tugas-khusus-perangkat-desa-untuk-tanggulangi-covid-19>., di unduh pada 5 Maret 2021

baru dalam menerima tamu, pemakaman, termasuk kegiatan keagamaan dan lingkungan.

5. Cara perangkat desa memberikan informasi terkait covid-19 setiap hari.

Pada hakikatnya upaya pemerintah desa dalam menanggapi dampak Covid-19 merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁴¹ Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 perlu diimplementasikan oleh pemerintah desa. Seperti yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan desa tersebut harus menjadi acuan dalam implementasi kebijakan pemerintah sebagai upaya penanganan Covid-19. Dalam implementasinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membutuhkan peran pemerintah desa dalam penanganan Covid-19. Peran pemerintah desa menjadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Jika dari skala terkecil pemerintahan bisa memutus pandemi, hal itu bisa terus meluas ke skala lebih besar mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai negara. Untuk itu upaya penanganan Covid-19 di tingkat desa harus terlaksana sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menguraikan bahwa pemerintah desa memiliki peran

⁴¹ Atikah Nur Hidayati, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggapi Dampak Covid-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13 No. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1>.

yang sangat penting dalam mengatur masyarakat di masa pandemi Covid-19.

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang disebut PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, dan fasilitas umum hingga moda transportasi. Dalam kondisi saat ini tentu banyak pertanyaan bagaimana penjelasan para ulama atau bagaimana pandangan hukum Islam tentang pandemi yang sedang terjadi saat ini. Apakah PSBB ini adalah salah satu cara tepat atau merugikan bagi umat ?

Dengan diberlakukannya PSBB tidak hanya aktifitas ekonomi saja yang terganggu, agama tentu merasa dirugikan dengan adanya PSBB. Agama juga bagian terkait yang terkena dampak kebijakan PSBB. PSBB juga berakibat pada aktifitas keagamaan di ruang publik yang menuntut keramaian. Disebutkan dalam hadits shahih riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Nabi SAW bersabda Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga.”

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ

“Maka Abdurrahman bin Auf mengabarkannya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian mendengar wabah berada di suatu kawasan, janganlah kalian datang

kesana, dan jika terjadi di suatu kawasan yang kalian diami, jangan kalian meninggalkannya.⁴²

Menurut Muammar Bakry selaku dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang juga sebagai imam besar di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar mengatakan, spirit kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan syariat Islam dalam memelihara jiwa manusia dari ancaman mara bahaya. Menurut beliau PSBB yang dilaksanakan pemerintah adalah untuk menjaga kemaslahatan bersama. Kemudian menghindarkan mara bahaya dan memelihara jiwa manusia dari Covid-19. Beliau juga menjelaskan, sebagai umat Islam tentunya ada perintah agama yang harus diikuti, yaitu pertama adalah perintah Allah, kedua perintah Rasulullah, dan ketiga perintah ulil amri atau pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas, hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam.⁴³ Sebagaimana Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء : ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman ! taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa : 59)

⁴² Al-Lu' Lu' Wal Marjan. h. 835.

⁴³ Humaniora, “Spirit PSBB Sesuai Dengan Syariat Islam,” *Mediaindonesia.Com*, April 25, 2020, <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/307466/tokoh-agama-spirit-psbb-sesuai-dengan-syariat-islam>., di unduh pada 11 Maret 2021

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Salah satunya pemberlakuan PSBB yang menjadi ikhtiar pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat terhindar dan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas secara normal kembali. PSBB dilaksanakan pemerintah yakni untuk menjaga kemaslahatan bersama dan menghindarkan masyarakat dari Covid-19. Kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan dari *Maqashid al-syari'ah*.⁴⁴ Maslahat disini berarti menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratannya.⁴⁵ Maslahat tersebut harus diamalkan sesuai dengan tujuannya.⁴⁶ Menghindari diri dari kemudaratannya untuk menyelamatkan jiwa dari bahaya virus merupakan bagian dari inti ajaran Islam dalam prinsip *Maqashid Syariah* yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik secara individu maupun bersama atau menyelamatkan jiwa dengan menghindari keburukan.⁴⁷ Dari uraian di atas tentu saja kita sebagai umat Islam harus menaati peraturan yang telah dikeluarkan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah guna kemaslahatan bersama. Perintah tersebut tentunya bersifat temporal dalam pemberlakuannya mengingat situasi dan kondisi yang sedang terjadi.⁴⁸

⁴⁴ Yubsir Yubsir, "Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam," *Al-'Adalah* 11, no. 2 (2013): 241–48, <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.265>.

⁴⁵ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi Dan al-Ghazali)," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (2017): 433–60, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

⁴⁶ Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 63–74, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

⁴⁷ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, I (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018). h. 32.

⁴⁸ Alamsyah Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2015): 479–92, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201>.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Akbar, Purnomo Setiady, and Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. JAKARTA: BumiAksara, 2008.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. I. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. VII. Jakarta: Bhineka Cipta, 2007.
- Departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa” Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fairus, Adira. *Mengenal Desa Dan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pixelindo, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan Satu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Maududi, Abu a’la al-. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Nasution, Albani, and Muhammad Syukri. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Sarman, and Muhammad Taufik Makaro. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. BANDUNG: MANDAR MAJU, 2002.

Shahih Bukhari-Muslim. *Al-Lu' Lu' Wal Marjan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017.

Sholihin, Bunyana. *Metodologi Penelitian Syari'ah*. I. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Sopiah, Etta Mamang Sangadi. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. YOGYAKARTA: CV. ANDI OFFSET, 2010.

Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. I. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014.

Syarif, Mujar Ibnu, and Ahmad Sukardja. *TIGA KATEGORI HUKUM Syariat, Fikih, Dan Kanun*. jakarta: sinar grafika, 2012.

Zuhraini. *Hukum Pemerintahan Desa*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Aura Publishing, 2017.

———. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014.

Sumber Jurnal

Alamsyah, Alamsyah. “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2015): 479–92. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201>.

Firdaus, Firdaus, and Zainal Azwar. “The Role of Substantive Understanding Approaches in The Changes of Fiqh.” *AL-*

- 'ADALAH 17, no. 1 (2020): 71–96.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6031>.
- Hasrul, Muh. “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” *Jurnal Legislatif* 3 (2020): 385–98.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10477>
- Hermanto, Agus. “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi Dan al-Ghazali).” *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (2017): 433–60.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Hidayati, Atikah Nur. “Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggapi Dampak Covid-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.” *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13 No. 1 (n.d.).
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1>.
- Rizal, Lutfi Fahrul. “PERSFEKTIF SIYÂSAH SYAR'IIYYAH TENTANG DARURAT NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 41–64.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404>.
- Rusfi, Muhammad. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 63–74.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.
- Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.
<https://www.neliti.com/id/publications/275406/pemerintahan-des>
- Yubsir, Yubsir. “Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam.” *Al-'Adalah* 11,

no. 2 (2013): 241–48.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v1i2.265>.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Sumber Wawancara

Dwi Purnanto (Sekretaris Desa Jatibaru), Wawancara dengan penulis, Jatibaru, 20 April 2021.

Eko Warsono (Kasi Pemerintahan), Wawancara dengan penulis, Jatibaru, 20 April 2020.

Kusharyanto (Kepala Desa Jatibaru), Wawancara dengan penulis, Jatibaru, 22 April 2021.

M. Rosyidin (Tim Relawan Desa Lawan Covid-19), Wawancara dengan penulis, Jatibaru, 13 April 2021.

Margono (Warga Desa Jatibaru), Wawancara dengan penulis, Jatibaru 15 Juli 2021.

Purwanto (Warga Desa Jatibaru), Wawancara dengan penulis, Jatibaru 15 Juli 2021.

Sutrisno (Warga Desa Jatibaru), Wawancara dengan penulis, Jatibaru 15 Juli 2021.

Wastuti (Warga Desa Jatibaru), Wawancara dengan penulis, Jatibaru 15 Juli 2021.

Yusuf (Warga Desa Jatibaru), Wawancara dengan penulis, Jatibaru 15 Juli 2021.

Sumber Website/Online

Chusna Farisa, Fitria. “5 Tugas Khusus Perangkat Desa Untuk Tanggulasi Covid-19.” *Kompas.Com*, April 5, 2020. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/05/12343071/5-tugas-khusu-perangkat-desa-untuk-tanggualngi-covid-19>. diunduh pada 5 Maret 2021.

Dwi. “Pengertian Peran Secara Umum,” June 2016. <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html> diunduh pada 14 September 2020.

Humaniora. “Spirit PSBB Sesuai Dengan Syariat Islam.” *Mediaindonesia.Com*, April 25, 2020. <https://mediaindonesia.com/humaniora/307466/tokoh-agama->

[spirit-psbb-sesuai-dengan-syariat-islam](#) di unduh pada 11 Maret 2021.

Sumber Dokumen Desa

Dokumen Desa "Profil Desa Jatibaru".

